

Elaborasi Program CSR Untuk Percepatan Pencapaian MDGs di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Indonesia

Herlan¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Deklarasi Milenium merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) pada tahun 2015. Menindaklanjuti upaya mempercepat pencapaian MDGs sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan program MDGs dengan melakukan model elaborasi program MDGs dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang selama ini program CSR masih belum dilakukan secara terkendali dan terkoordinasi dengan baik dalam implementasinya. Oleh karena itu melalui model kemitraan antara pemerintah daerah dengan program CSR yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan diharapkan program MDGs dapat tercapai.

Kata Kunci : Elaborasi, MDGs, CSR

Pendahuluan

Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuannya akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.

Adapun 8 tujuan MDGs yang ingin dicapai dan dituntaskan oleh bangsa Indonesia tahun 2015, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Menurunkan kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani program MDGs tersebut telah menggalakkan pembangunan sejak tahap perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen anggarannya. Berlandaskan strategi *pro-growth, pro-job, pro-poor*, dan *pro-environment*, alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan produktif dengan masyarakat madani dan

¹ Doktor & Wakil Dekan Bidang Pendidikan FISIP Untan

sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.

Menurut laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di Indonesia (Bappenas, 2011) bahwa sampai dengan tahun 2010 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2105; dan (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Adapun sasaran dari tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah dicapai, mencakup:

- a. **MDG 1** - Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan per kapita kurang dari USD 1 per hari telah menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008.
- b. **MDG 3** - Kesetaraan gender dalam semua jenis dan jenjang pendidikan telah hampir tercapai yang ditunjukkan dengan rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B berturut-turut sebesar 99,73 dan 101,99, dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 99,85 pada tahun 2009.
- c. **MDG 6** - Prevalensi tuberkulosis menurun dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2009.

Selanjutnya, sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (*on-track*) adalah:

- a. **MDG 1** - Prevalensi balita kekurangan gizi telah berkurang hampir setengahnya, dari 31 persen pada tahun 1989 menjadi 18,4 persen pada tahun 2007. Target 2015 sebesar 15,5 persen diperkirakan akan tercapai.
- b. **MDG 2** - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan tingkat melek huruf penduduk melebihi 99,47 persen pada 2009.
- c. **MDG 3** - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SM/MA/Paket C dan pendidikan

tinggi pada tahun 2009 berturut-turut 96,16 dan 102,95. Dengan demikian maka target 2015 sebesar 100 diperkirakan akan tercapai.

- d. **MDG 4** - Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.
- e. **MDG 8** - Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan, bisa diprediksi dan non-diskriminatif – ditunjukkan dengan adanya kecenderungan positif dalam indikator yang berhubungan dengan perdagangan dan system perbankan nasional. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 menjadi 10,9 persen pada 2009. *Debt Service Ratio* juga telah berkurang dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.

Sasaran dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang telah menunjukkan kecenderungan kemajuan yang baik namun masih memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, mencakup:

- a. **MDG 1** - Indonesia telah menaikkan ukuran untuk target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33 persen (2010) menjadi 8-10 persen pada tahun 2014.
- b. **MDG 5** - Angka kematian ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.
- c. **MDG 6** - Jumlah penderita HIV/AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks.
- d. **MDG 7** - Indonesia memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, namun tetap berkomitmen untuk meningkatkan tutupan

hutan, memberantas pembalakan liar dan mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 26 persen selama 20 tahun ke depan. Selain itu, saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.

Keberhasilan pembangunan Indonesia, telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan pembangunan ekonomi dalam lima tahun terakhir, telah mengurangi ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju. Negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization of Economic and Cooperation Development*) mengakui dan memberikan apresiasi kemajuan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan diundang untuk masuk dalam kelompok '*enhanced engagement countries*' atau negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya dengan negara-negara maju. Indonesia sejak 2008 juga tergabung dalam kelompok Group-20 atau G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Dalam merancang pencapaian MDGs ke depan, jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting mencakup perluasan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta perlindungan bagi hak-hak reproduksi. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia adalah 237,5 juta jiwa (hasil sementara Sensus Penduduk 2010, BPS), telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan jumlahnya pada tahun 1971. Meski terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 1,97 persen per tahun pada kurun waktu 1980-1990 menjadi 1,49 persen per tahun pada kurun waktu 1990-2000, dan menjadi 1,30 persen per tahun pada tahun 2005. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan mencapai sekitar 247,6 juta jiwa (Proyeksi

Penduduk Indonesia 2005-2025). Dari jumlah tersebut, sekitar 60,2 persen berada di Pulau Jawa yang memiliki luas hanya 7 persen dari total luas Indonesia.

Langkah - langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, meliputi:

1. Pemerintah menyusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs yang akan digunakan sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan percepatan pencapaian MDGs di seluruh Indonesia.
2. Pemerintah provinsi menyiapkan "Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs" yang digunakan sebagai dasar bagi perencanaan, peningkatan koordinasi upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Alokasi dana pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten akan terus ditingkatkan untuk mendukung intensifikasi dan perluasan program-program pencapaian MDGs. Akan dirumuskan mekanisme pendanaan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pencapaian MDGs.
4. Dukungan untuk perluasan pelayanan sosial di daerah tertinggal dan daerah terpencil akan ditingkatkan.
5. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS atau *Public Private Partnership/PPP*) di sektor sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan akan dikembangkan untuk meningkatkan sumber pembiayaan dalam mendukung upaya pencapaian MDGs.
6. Mekanisme untuk perluasan inisiatif CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan diperkuat dalam rangka mendukung pencapaian MDGs.
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan terkait konversi utang (*debt swap*) untuk pencapaian MDGs dengan negara-negara kreditor.

Elaborasi Program CSR Dalam Percepatan Pencapaian MDGs di Kabupaten Kubu Raya

Dalam upaya percepatan pencapaian MDGs, peran serta masyarakat, termasuk organisasi masyarakat dan kelompok perempuan, telah memberikan kontribusi nyata terutama di bidang pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan lingkungan hidup. Kedepan, gerakan masyarakat yang mengakar di akar rumput tersebut akan terus diperhatikan untuk mempercepat pencapaian MDGs dan meningkatnya kesejahteraan secara berkelanjutan.

Menindaklanjuti upaya mempercepat pencapaian MDGs selama lima tahun ke depan (tahun 2015) sebagaimana diamanatkan oleh Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, berdiri sejak disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus 2007, telah bertekad dan berkomitmen untuk mensukseskan percepatan pencapaian MDGs.

Namun upaya untuk merealisasikan percepatan pencapaian MDGs di kabupaten Kubu Raya di tahun 2015 bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, mengingat tahun 2011 yang lalu, ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya masih berada pada peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten Kubu Raya masih berada dalam posisi rentan dari masalah kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang masih rendah. Ini menunjukkan bahwa APBD kabupaten Kubu Raya yang berjalan selama ini maupun adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan wilayah Kabupaten Kubu Raya, masih belum mampu untuk membiayai semua program yang telah direncanakan. Kondisi seperti ini berdampak terhadap tidak berjalannya program-program dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat. Oleh sebab itu berbagai alternatif dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan

pendanaan dalam mensukseskan percepatan pencapaian MDGs tahun 2015.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam mendukung percepatan pencapaian MDGs adalah melakukan elaborasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya dengan program percepatan pencapaian MDGs tahun 2015 yang dilaklkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Wineberg dan Rudolph memberi definisi CSR sebagai: *“The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy”*(Wineberg, 2004:72). Selanjutnya dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa konsep CSR itu memang agak tumpang tindih, (*overlap*) dengan konsep (*good*) *corporate governance* dan konsep etika bisnis (Reksodiputro,2004). Sedangkan Schermerhorn (1993) memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal (Schermerhorn, 1993).

Dengan demikian dapat dikatakan CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005).

Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan CSR ini antara lain Pemberian/Amal Perusahaan (*Corporate Giving/Charity*), Kedermawanan Perusahaan (*Corporate philanthropy*), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (*Corporate Community/Public Relations*), dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (*Corporate Social Investment/Investing*) yang didorong oleh

spektrum motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan” (Brilliant, 1988: 299-313). Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro-masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan ditengah arus neoliberalisme seperti sekarang ini. Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.

Dasar pertimbangan mengapa pemerintah Kabupaten Kubu Raya menganggap perlu melibatkan pihak perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD dalam mensukseskan program MDGs di Kabupaten Kubu Raya, antara lain:

Perusahaan swasta atau BUMN/BUMD di Kabupaten Kubu Raya cukup banyak jumlahnya yaitu 125 perusahaan. Dimana untuk tiap perusahaan yang sudah mendapatkan hasil atau keuntungan mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu tanggung jawab sosial bagi setiap perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru.

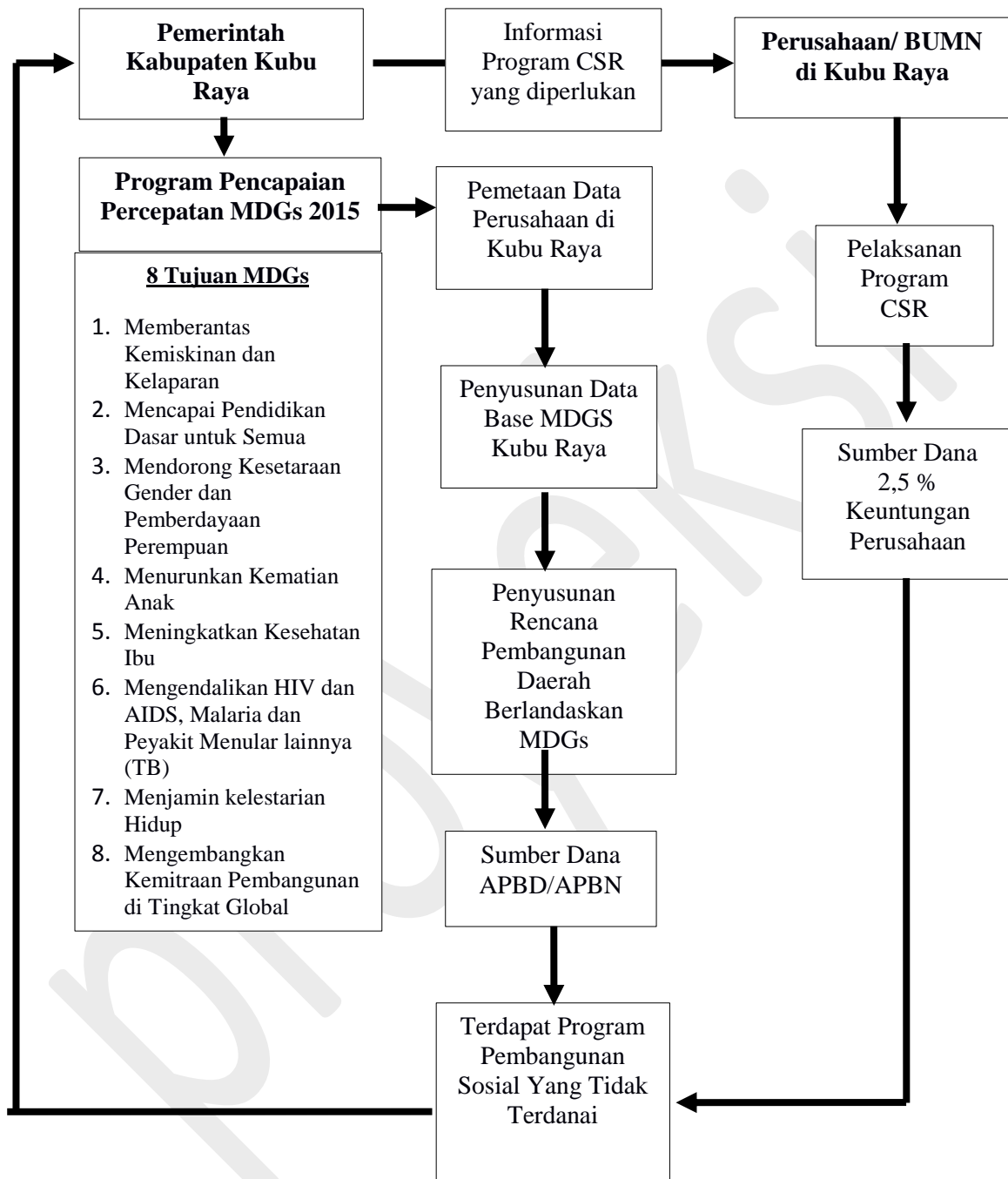
Adanya deklarasi yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia melalui *Global Governance Initiative* menggelar *World Business Council For Sustainable Development* di New York pada tahun 2005, Salah satu deklarasi penting disepakati bahwa CSR jadi wujud komitmen dunia usaha untuk membantu PBB dalam merealisasikan *Millennium Development Goals* (MDGs).

Amanat yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Program percepatan pembangunan MDGs yang ingin dicapai apabila ditinjau dengan visi dan misi Pemerintah kabupaten Kubu Raya sangat relevan, yaitu: Kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas, namun dalam merealisasikannya masih mengalami hambatan terutama terbatasnya dana.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut (*Triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, adanya tanggung jawab sosial dari pihak perusahaan dengan menyisihkan keuntungan sebesar 2,5 persen dipandang penting untuk dioptimalkan dan didayagunakan dalam percepatan MDGs di Kabupaten Kubu Raya.

Model Elaborasi Program CSR Dengan Pencapaian Percepatan MDGs 2015



Berdasarkan uraian bagan di atas dapatlah dikemukakan langkah-langkah yang dilakukan agar terciptanya elaborasi program CSR yang akan dilaksanakan oleh pihak Perusahaan bersinergi dengan program pembangunan yang berlandaskan pada percepatan pencapaian

MDGs 2015 di Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

Pemetaan Stakeholder Sektor Swasta (Perusahaan)

Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, ada yang terdiri dari perusahaan

perkebunan, kehutanan, penangkaran ikan, kuasa pertambangan, dan perusahaan milik BUMN. Perusahaan BUMN misalnya, PT. Angkasa Pura yang mengelola Bandara Supadio, Dealer PT. PLN Wilayah V yang mengelola listrik atau Pertamina yang di Kubu

Raya hanya khusus melayani pesawat-pesawat yang datang dan pergi di Bandara Supadio. Masing-masing, merupakan kegiatan BUMN yang memiliki Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terhadap masyarakat (minimal terhadap masyarakat sekitar).

Tabel 1
Jumlah dan Jenis Perusahaan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011

No	Bidang Usaha	Jumlah Perusahaan	Keterangan
1.	Perkebunan Sawit	9	Menghasilkan
2	Kehutanan	6	Menghasilkan
3	Penangkaran Ikan Arwana	19	Menghasilkan
4	Kuasa Pertambangan	11	Menghasilkan
5	Industri berskala Besar	75	Menghasilkan
6.	Usaha BUMN	5	Menghasilkan
	Jumlah	125	

Sumber data: Data Diolah KKR, 2013

Perusahaan-perusahaan ini diharapkan dengan keuntungan yang diperolehnya diharapkan sebagian dari keuntungannya itu disumbangkan kepada masyarakat. Angka pastinya sulit ditentukan, tetapi, sebagai indikasi pendapatan potensial, banyaknya pelanggan atau konsumen yang menggunakan layanan perusahaan-perusahaan tersebut, dapat proyek menyebutkan pendapatan potensial perusahaan.

Selama ini program CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak diketahui berapa besar jumlah yang disampaikan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan dalam mengeluarkan data keuangan sangat tertutup. Demikian juga dalam melaksanakan CSR seringkali tidak diketahui oleh pihak pemerintah kabupaten sehingga program CSR yang dilakukan kurang koordinasi dengan pihak pemda kabupaten Kubu Raya.

Di sisi lain, banyak perusahaan yang pada waktu akan beroperasi, memberi janji yang menggiurkan kepada masyarakat sekitar. Dengan mengatakan: *“Perusahaan ini, nanti akan menyediakan pendekatan yang inovatif bagi pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya dan konservasi keanekaragaman hayati. Dari awal, pekerjaan besar ini telah*

dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah prinsip utama: komunitas, kemitraan, konsultasi dan tanggung jawab perusahaan.”

Namun dalam realitanya seringkali perilaku perusahaan-perusahaan, jauh dari bertanggungjawab karena perusahaan ini menanamkan modalnya dalam wilayah yang secara lokal masuk dalam hak ulayat. Sehingga karena perusahaan merasa telah memiliki hak konsesi maupun hak konversi, maka kemudian perusahaan menganggap bahwa masyarakat lokal tidak berhak untuk menggunakan hak ulayatnya. Oleh karena itu, dampaknya jauh lebih banyak daripada manfaatnya.

Salah satu contoh dampak yang tidak akan pernah dapat diperbaiki adalah hilangnya keragaman hayati yang menjadi ciri-khas alam Kalimantan. Begitu pula dengan hilangnya hak azasi masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hilangnya, bibit-bibit tanaman lokal (padi local, buah-buahan lokal, anggrek, binatang maupun pohon-pohon khas Kalimantan), maka tidak mengherankan jika akan timbul masalah HAM dan lingkungan hidup yang buruk. Dari persepektif luas lainnya – yaitu perubahan iklim – dapat juga diperdebatkan bahwa akan lebih bertanggungjawab jika perusahaan,

meninggalkan kegiatannya itu dan tidak mengutak-atik aspek-aspek yang dapat mempengaruhi atmosfer.

Melalui pendataan jumlah perusahaan swasta dan BUMN diharapkan terjadi koordinasi dan saling sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah termasuk percepatan pencapaian MDGs.

Penyusunan Database MDGs

Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten termuda di Kalimantan Barat bertekad ingin menjadi yang terdepan dan berkualitas. Menyadari berbagai keterbatasan dan hambatan maka kegiatan pembangunan harus terfokus pada permasalahan-permasalahan yang dijadikan skala prioritas, dan diprogramkan dalam perencanaan daerah.

Salah satu input yang menentukan kualitas perencanaan pembangunan adalah ketersediaan data yang berkualitas yaitu data yang akurat dan terkini. Data juga sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara langsung menjadi alat penilaian atas kinerja SKPD terkait.

Kegiatan penyusunan database MDGs dan program pembangunan Kabupaten Kubu Raya melibatkan kerjasama beberapa unsur antara lain:

- a. Bappeda Kabupaten Kubu Raya
- b. Bappenas
- c. Kemitraan/Partnership Indonesia
- d. Yayasan Dian Khatulistiwa (YSDK).

Proses penyusunan data Bases MDGs dimulai dengan lokakarya memahami program aplikasi komputer untuk penyusunan database program *Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring* (P3BM) Bappenas. Kemudian diadakan pelatihan bagi staf seluruh SKPD termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Selesai pelatihan peserta dikumpulkan kembali untuk mengentry data SKPD masing-masing yang didampingi oleh tim P3BM Bappenas. Dari entry data tersebut, kabupaten Kubu Raya sudah dapat mengisi 75 indikator MDGs.

Menurut Koordinator tim P3BM Bappenas (Dr. Ir. La Ega, MS), berdasarkan entry data yang sudah dilakukan di beberapa daerah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia,

Kabupaten Kubu Raya dapat mencapai 75 indikator dari 91 indikator dan ini merupakan yang tertinggi di Indonesia saat ini (27 Februari 2013).

Dengan adanya database di Kabupaten Kubu Raya ini, maka setiap masyarakat berhak mendapatkan data-data tentang kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya di Bappeda Kubu Raya. Selain itu melalui database MDGs dan program pembangunan ini, setiap SKPD dapat mengelola data-data sesuai dengan bidangnya dengan sasaran, tepat ukuran dan diharapkan dapat berdampak pada efisiensi anggaran yang dikelola oleh pemerintah.

Sebagaimana diungkapkan Bupati Kubu Raya (Muda Mahendra, 2011) bahwa database MDGs ini dapat dimanfaatkan oleh setiap SKPD dan dapat mengelola data-data yang dihimpun dari berbagai sumber untuk menjadi diagram guna mengukur keberhasilan sebuah institusi maupun programnya. Sebagaimana diketahui bahwa IPM Kabupaten Kubu Raya masih berada pada peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar tahun 2012.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Berlandaskan MDGs

Mengingat tenggat waktu pencapaian MDGs adalah tahun 2015 nanti, maka forum data pembangunan ini dipandang perlu sebagai tolok ukur sejauh mana tujuan pembangunan Kubu Raya telah tercapai selama 5 tahun terakhir (2008 – 2013). Dari forum diskusi Bappeda diharapkan akan terkumpul data yang mendetail dari setiap instansi pemerintah. Hal ini sebagai acuan dalam merancang pembangunan daerah Kubu Raya 5 tahun kedepan sehingga bisa dilihat sektor mana yang harus mendapat prioritas pembangunan, baik melalui APBN, APBD maupun bantuan pihak ketiga.

Penyerasian Program CSR Dengan Program MDGs

Pihak ketiga dalam konsep ini adalah pihak perusahaan dilibatkan untuk berperan serta dalam penanggulangan pendanaan dalam program MDGs yang tidak terpenuhi dari anggaran yang tersedia dilimpahkan kepada

pihak perusahaan untuk membantu dari program CSR sebesar 2,5% dari keuntungannya perusahaan. Oleh sebab itu, peran Pemda Kubu Raya dalam hal ini menyiapkan data yang akurat terhadap daerah-daerah dan program apa yang dibutuhkan untuk dilaksanakan oleh pihak perusahaan disinilah terjadi sinergitas dalam percepatan program MDGs antara pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan pihak perusahaan melalui program CSR yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat tertanggulangi secara merata dan program CSR yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dapat terselenggara secara terarah.

Dengan kata lain melalui database MDGs ini akan menjadi sumber data dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Kubu Raya. Selain itu data MDGS yang lengkap juga menjadi salah satu informasi yang sangat diperlukan dalam memberikan masukan dari pihak Pemda Kabupaten Kubu Raya kepada pihak perusahaan/BUMN dalam menentukan daerah mana yang memerlukan pembangunan sosial serta jenis program CSR apa yang mestinya harus dilakukan oleh pihak perusahaan atau BUMN sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Ambadar, Jackie, 2008, *CSR Dalam praktek di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Badaruddin, 2008, *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, USU, Medan.
- Boediono, 2009, *Ekonomi Indonesia Mau Kemana*, Kepustakaan Populer Gramedia dan Freedom Institute, Jakarta.
- Daniri, Mas Achmad, 2009, *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Laporan)*, Jakarta.

Simpulan

1. Jumlah perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Kubu Raya merupakan potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dalam rangka percepatan pembangunan MDGs dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri melalui dana CSR yang menjadi tanggung jawab sosialnya dalam pembangunan masyarakat.
2. Untuk mensukseskan percepatan pencapaian MDGs di Kabupaten Kubu Raya, perusahaan harus mengakui bahwa permasalahan masyarakat adalah tanggung jawab pihak perusahaan juga. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus bersedia menanganinya. Suatu rencana strategis di belakang program-program CSR justru akan mempercepat dalam mengatasi pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di kabupaten Kubu Raya.
3. Pelaksanaan program CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan/BUMN kepada masyarakat apabila dielaborasi dengan program percepatan pencapaian MDGS yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kubu Raya hasilnya akan mencapai hasil yang maksimal dan sasaran program yang tepat, dan sekaligus dapat mendukung tercapainya tujuan MDGs.

Hikmat, Harry, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milineum 2010 di Indonesia, Diterbitkan Oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Profil Investasi Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2009, Diterbitkan oleh Bappeda Kabupaten Kubu Raya.

Reksodiputro, Mardjono. (20/12/04) Makalah *Lokakarya Nasional Departemen Luar Negeri RI, dengan tema "Peran sektor usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia"*., Jakarta: Hotel Borobudur.

- Schermerhorn, John R. 1993. *Management for Productivity*. New York: John Wiley & Sons
- Seda, Fransisca SSE, 2004, *Keadilan Sosial, Upaya mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2004, *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsep, Indikator dan Strategi*, Malang.
- Widjaya, Gunawan & Pratama, Yeremia Ardi, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wineberg, Danette and Phillip H. Rudolph. (May 2004). "Corporate Social Responsibility – What Every In House Counsel Should Know", dalam ACC Docket.

Artikel Koran dan Majalah :

- Agus Suman, 12 April 2010, *Paradigma CSR*, Harian Republika, Halaman 4.
- Harian Koran Tempo, 15 Januari 2009, *Kesalahpahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Harian Seputar Indonesia, 7 Desember 2008, *Kapitalisme Kreatif Lewat CSR*, Halaman 5.

Internet :

- Kalangit, Holy K. M., *Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 2 Februari 2009. www.csrindonesia.com.
- Pelaksanaan CSR di Indonesia*, [http://www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-iii-finish/25 Juni 2009](http://www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-iii-finish/25%20Juni%202009).
- Sofian, Jhonatan, *Mencari Bentuk Ideal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://jsofian.wordpress.com>.
- Suharto, Edi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, *Harian Pikiran Rakyat*, 22 April 2008, <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues>, diakses 25 Juli 2009.